

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENGANGKUTAN PADA PT. ANUGERAH KREASI SELARAS MEDAN

Retno Putri Andini ^{1*)}; M. Reza Septriawan ²⁾; Ratna Dina Marviana ³⁾

- 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
email: retnoputriundhar@gmail.com
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
email: r3z4@dharmawangsa.ac.id
- 3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
email: ratnadina@dharmawangsa.ac.id

*Corresponding email: retnoputriundhar@gmail.com

Abstract

The duty to pay the taxes of Anugerah Kreasi Selaras Medan pursuant to the established rate, with a reduction of the income tax of Article 23 of 2% of the tax base. (DPP). Respect for payments and reporting reflects professionalism, social responsibility, and positive contributions to economic development. Focus on the tax cuts, calculation, and reporting aspects of the Harmonized Creative Awards, related to Value Added Tax (PPN). Despite a VAT rate of 11%, the company exempts VAT on transport services under government regulations. And regardless of the purpose of this study, How the calculation, reduction, and deposition of income tax and value added tax on PT. And despite payments being delayed for several months due to falls on Sunday, the company is still showing good faith. PT Anugerah Kreasi Selaras adheres to the cut-off exemption rules for service companies with tax-free declarations. Annual evaluation shows an increase in the amount of DPP and VAT owed paid. The VAT exemption on transport services is aimed at keeping land transport tariffs affordable to the public and encouraging economic growth and job creation. The positive impact involves strengthening the public transport sector and preventing the transition of the public to other modes of transport that may occur as a result of the increase in tariffs due to the burden of VAT.

Keyword: Corporate Tax and VAT Exemption on Transport Services

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi negara, dan dua jenis pajak yang umumnya dikenakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPH merupakan kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak. Badan usaha atau perusahaan menjadi subjek pajak di dalam negeri dan berperan sebagai penyumbang utama dalam pendapatan suatu negara. Salah satu bentuk pajak yang relevan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diterima dalam satu tahun pajak tertentu. Di antara jenis PPH tersebut, ada yang disebut sebagai PPH pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam

WORKSHEET: Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573
Volume. 3 Nomor. 2, Mei 2024

negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPH (Ria Agustin, 2019). PPH pasal 23 ini dikenakan pada penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan lainnya yang belum dipotong PPH pasal 21, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Pajak, dalam esensinya merupakan sebuah iuran yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memperoleh pendapatan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Mardiasmo, 2018). Peran pajak sangatlah krusial bagi suatu negara karena dana yang diperoleh dari pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan segala kegiatan pembangunan. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi bagian dari kas negara, lalu dialokasikan melalui proses Undang-Undang Anggaran

Pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi negara, dan dua jenis pajak yang umumnya dikenakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPH merupakan kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak. Badan usaha atau perusahaan menjadi subjek pajak di dalam negeri dan berperan sebagai penyumbang utama dalam pendapatan suatu negara. Salah satu bentuk pajak yang relevan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diterima dalam satu tahun pajak tertentu. Di antara jenis PPH tersebut, ada yang disebut sebagai PPH pasal 23. PPH pasal 23 ini dikenakan pada penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan lainnya yang belum dipotong PPH pasal 21, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa EMKL (ekspedisi muatan kapal laut) di Medan yang melayani pengurusan dokumen Kepabeanan (Document Clearance) atau disingkat PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) dan juga melayani Pengangkutan logistic. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, PT Anugerah Kreasi Selaras mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, serta pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23. Dalam hal ini PT Anugerah Kreasi Selaras Medan wajib melakukan pemotongan, penyeteroran serta melaporkan pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengangkutan atau salah satunya adalah

WORKSHEET: Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573
Volume. 3 Nomor. 2, Mei 2024

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dimana tarif yang wajib dipotong adalah 2% dari total pendapatan jasa dan tarik pajak pertambahan nilai yang wajib di potong adalah 11% dari total pendapatan jasa.

Permasalahan utamanya tampak terletak pada ketidak akuratan pencatatan dan pelaporan terkait PPh Pasal 23 dan PPN atas pendapatan dari jasa Pengangkutan. Untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, sangat penting bagi PT Anugerah Kreasi Selaras Medan untuk melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak dengan tepat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi masalah dalam hal ini masalah pencatatan dan pelaporan yang tidak akurat dapat menyebabkan konsekuensi serius, seperti sanksi perpajakan dan denda yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada jasa pengangkutan di PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kesalahan atau ketidak sesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Terkadang yang menjadi salah satu penyebab telatnya beberapa perusahaan melaporkan Pph 23 dikarenakan kurangnya ketelitian staf bagian pembayaran Pajak Pph Pasal 23 sehingga Penting juga untuk dicatat bahwa kekurangan ketelitian dari staf yang menangani pembayaran PPh Pasal 23 bisa menjadi penyebab keterlambatan dalam pelaporan pajak ini, yang akhirnya bisa menyebabkan keterlambatan pada saat membayar yang berakibatkan munculnya STP(Surat Tagihan Pajak)atas denda administrasi telat bayar dikemudian hari. Dan adapun kurangnya komunikasi antara staf dengan konsultan pajak yang berkaitan dengan proses pelaporan dan pembayaran pajak tersebut sehingga kurangnya mendapatkan data yang lebih akurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber berupa laporan penjualan pada bulan januari- desember Tahun 2021-2022 yang disajikan dalam bentuk bulanan sehingga berjumlah Dua Puluh Empat bulan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini adalah PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan. melalui teknik wawancara dan observasi, yang kemudian diolah oleh penulis berupa penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan tiga tahapan berupa tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk selanjutnya diberikan saran. Lokasi Penelitian yang diambil oleh

WORKSHEET: Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573
Volume. 3 Nomor. 2, Mei 2024

penulis yaitu pada PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan. yang beralamat di Jalan JL. Pasar III Krakatau Komplek Green Sevilla Blok B NO. 22, Kota Medan, Medan Timur, Sumatera Utara, ID, 20231

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Deskripsi Objek Penelitian

PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan, perusahaan yang fokus pada jasa transportasi dan pengelolaan dokumen kepabeanan (PPJK). Perusahaan ini menekankan profesionalitas, dedikasi, dan kerja keras dari timnya serta menawarkan layanan lengkap dalam bidang logistik dan ekspedisi. Misi utamanya adalah memberikan layanan unggul yang melebihi harapan pelanggan dengan harga yang kompetitif.

PT. Anugerah Kreasi Selaras Medan mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun, terlihat dari jumlah konsumen yang meningkat yang mempercayai mereka sebagai perusahaan yang tepat untuk pengelolaan dokumen kepabeanan. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Pasar III Komplek Green Sevilla Blok B21 dan memiliki 47 karyawan yang terbagi ke dalam beberapa divisi kunci seperti keuangan, dokumen, operasional, dan lapangan. Sebagai pihak yang pemotong pajak penghasilan, PT. Anugerah Kreasi Selaras memiliki kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan pajak perusahaan tersebut.

2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 periode 2021

Daftar Penerapan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa pengangkutan PT Anugerah Kreasi Selaras

NO	Penyedia Jasa	DPP	TARIF	PPH Pasal 23
1.	MTU	126.565.000	2%	-
2.	SKT	22.313.000	2%	446.260
3.	B. JAYA	24.610.000	2%	492.200
4.	AS	58.240.000	2%	1.164.800
5.	JAB	29.362.800	2%	587.256
6.	ASST	35.418.820	2%	708.376
7.	SJC	48.804.600	2%	976.092
TOTAL		345.314.220		4.374.984

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Dasar penghasilan yang dipotong serta tarif pemotongan pph 23 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negara lainnya, DPP atau jumlah bruto penghasilan yang disebutkan dalam konteks pajak penghasilan pasal 23 merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang dipotong. Pajak ini harus dipotong oleh pihak yang membayarkan kepada subjek pajak tertentu sebelum pembayaran tersebut dilakukan. DPP atau jumlah bruto penghasilan ini menjadi dasar perhitungan untuk pemotongan pajak tersebut, sesuai dengan tarif yang telah ditentukan untuk pajak penghasilan pasal 23.

PT Anugerah Kreasi Selaras, sebagai penyewa jasa pengangkutan atau ekspedisi barang, memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terhadap perusahaan yang menyediakan layanan jasa sewa angkutan untuk mereka. Tarif pemotongan ini ditetapkan sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Contoh Analisis pajak penghasilan pasal 23 sehubungan dengan jasa pengangkutan: PT Anugerah Kreasi Selaras membayar jasa pengangkutan pada PT.SETIA KAWAN TRANSPORTASI sebesar Rp 10.000.000,-, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 23 nya adalah :

$$2\% \times 10.000.000,- = 200.000,-$$

Jadi, PT Anugerah Kreasi Selaras berhak memotong PPh 23 sebesar Rp 200.000 sehingga yang dibayarkan PT Anugerah Kreasi Selaras adalah :

$$\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 9.800.000,-$$

Maka setelah pengenaan tarif yang dikenakan PT Anugerah Kreasi Selaras harus membayar PT.SETIA KAWAN TRANSPORTASI sebesar Rp 9.800.000

Berdasarkan data diatas pada tahun 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%. Namun, terdapat beberapa perusahaan jasa yang tidak dapat dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 karena memiliki surat keterangan bebas dari direktorat jenderal pajak. Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT Anugerah Kreasi Selaras pengantaran container maka PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa dari perusahaan lain atas jasa pengangkutannya.

3 Mekanisme Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 priode 2021

Berikut ini adalah pencatatan transaksi Biaya pengangkutan Pasal 23 pada PT. Anugerah Kreasi Selaras.

PT Anugerah Kreasi Selaras telah melakukan jurnal transaksi setiap bulannya:

1. Pada masa Januari 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 241.449.600-, maka pada tanggal 31 Januari 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 241.449.600-, (debit) Hutang PPh 23 Rp 4.828.992-, dan hutang biaya pengangkutan Rp 236.620.608-,
2. Pada masa Februari 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 335.790.926-, maka pada tanggal 28 Februari 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 335.790.926-, (debit) Hutang PPh 23 Rp 6.715.819-, dan hutang biaya pengangkutan Rp 329.075.107-,
3. Pada masa Maret 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 386.600.500-, maka pada tanggal 31 Maret 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan Rp386.600.500-, (debit) Hutang PPh 23 Rp5.221.124-, dan hutang biaya pengangkutan
4. Rp 381.379.376-,
5. Pada masa April 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 383.490.151-, maka pada tanggal 30 April 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan Rp. 383.490.151-, (debit) Hutang PPh 23 Rp 7.669.803-, dan hutang biaya pengangkutan Rp 375.820.348-,
6. Pada masa Mei 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 240.383.120-, maka pada tanggal 31 Mei 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 240.383.120-, (debit) Hutang PPh 23 Rp 4.807.662-, dan hutang biaya pengangkutan Rp 235.575.458-,
7. Pada masa Juni 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 330.835.050-, maka pada tanggal 30 Juni 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 330.835.050-, (debit) Hutang PPh 23 Rp 6.616.701-, dan hutang biaya pengangkutan Rp 324.218.339-,
8. Pada masa Juli 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 346.288.880-, maka pada tanggal 31 Juli 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah

biaya pengangkutan Rp 346.288.880-, (debit) Hutang PPh 23 Rp 5.009.958-, dan hutang biaya pengangkutan

9. Rp 341.278.922-,
10. Pada masa Agustus 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp204.831.920 -, maka pada tanggal 31 Agustus 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 204.831.920-, (debit) Hutang PPh 23 Rp2.983.698 -, dan hutang biaya pengangkutan Rp201.848.222 -,
11. Pada masa September 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 275.696.020-, maka pada tanggal 30 September 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 275.696.020-, (debit) Hutang PPh 23 Rp3.765.180 -, dan hutang biaya pengangkutan Rp271.930.840 -,
12. Pada masa Oktober 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 346.288.880-, maka pada tanggal 31 Oktober 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 346.288.880-, (debit) Hutang PPh 23 Rp5.009.958 -, dan hutang biaya pengangkutan Rp341.278.922 -,
13. Pada masa November 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 265.461.540-, maka pada tanggal 30 November 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 265.461.540-, (debit) Hutang PPh 23 Rp2.461.691 -, dan hutang biaya pengangkutan Rp262.999.849 -,
14. Pada masa Desember 2021 PT Anugerah Kreasi Selaras menggunakan jasa pengangkutan sebesar Rp 345.314.220-, maka pada tanggal 31 Desember 2021 Penjualan yang telah dilakukan adalah biaya pengangkutan 345.314.220-, (debit) Hutang PPh 23 Rp4.374.984 -, dan hutang biaya pengangkutan Rp340.939.236 -,

PT Anugerah Kreasi Selaras telah melakukan jurnal transaksi setiap bulannya:

1. Pada tanggal 07 Febuari 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 2.504.348,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 371.119.422,- (debit) dan kas Rp 373.623.770,- (kredit)
2. Pada tanggal 07 Maret 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 2.266.844,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 307.677.356,- (debit) dan kas Rp 309.944.200,- (kredit)

3. Pada tanggal 07 April 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 7.016.272,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 622.351.308,- (debit) dan kas Rp 629.367.580,- (kredit)
4. Pada tanggal 07 Mei 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 2.699.226,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 309.127.074,- (debit) dan kas Rp 311.826.300,- (kredit)
5. Pada tanggal 07 Juni 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 1.896.760,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 270.605.240,- (debit) dan kas Rp 272.502.000,- (kredit)
6. Pada tanggal 07 Juli 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 5.018.282,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 423.704.818,- (debit) dan kas Rp 428.723.100,- (kredit)
7. Pada tanggal 07 Agustus 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 1.603.311,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 258.627.249,- (debit) dan kas Rp 260.230.560,- (kredit)
8. Pada tanggal 07 September 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 2.839.631,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 275.075.559,- (debit) dan kas Rp 277.915.190,- (kredit)
9. Pada tanggal 07 Oktober 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 2.504.348,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 371.119.422,- (debit) dan kas Rp 373.623.770,- (kredit)
10. Pada tanggal 07 November 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 733.138,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 296.270.237,- (debit) dan kas Rp 297.003.375,- (kredit)
11. Pada tanggal 07 Desember 2022 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 1.909.569,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 291.981.631,- (debit) dan kas Rp 293.891.200,- (kredit)
12. Pada tanggal 07 Januari 2023 PT Anugerah Kreasi Selaras melakukan pembayaran biaya pengangkutan, maka jurnal yang dibuat adalah Hutang PPh Pasal 23 Rp 1.692.630,- (debit). Hutang biaya pengangkutan Rp 322.771.218,- (debit) dan kas Rp 324.463.848,- (kredit)

4 Analisis Penyetoran dan Pelaporan pajak pertambahan Nilai

Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah menyetorkan pajaknya. Analisis penyetoran dan pelaporan PPN PT. Anugerah Kreasi Selaras dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2 Analisis Penyetoran Dan Pelaporan PPN

	Undang-Undang	Pelaksanaan
Pemungutan PPN	Sarana Pemungutan: faktur pajak(standar/sederhana/dokumen lain	PT. Anugerah Kreasi selaras membuat faktur pajak sederhana sebagai bukti adanya pemungutan pajak.
Penyetoran PPN	Sarana Penyetoran: E-Billing	PT. Anugerah Kreasi selaras tidak ada melakukan penyetoran PPN karena PPN di Bebaskan.
	Batas waktu penyetoran: Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak brakhir	PT. Anugerah Kreasi selaras tidak memili batas waktu penyetoran PPN karena tidak dipungut
	sanksi terlambat setor: 2% sebulan	Tidak ada sanksi karena penyetoran tidak di lakukan
Pelaporan PPN	Sarana Pelaporan: SPT Masa	PT. Anugerah Kreasi selaras tetap melakukan pelaporan PPN ke kantor pelayanan pajak tempat PT. Anugerah Kreasi selaras terdaftar dengan menggunakan formulir SPT Masa
	Batas waktu pelaporan: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak brakhir	Pelaporan dilakukan setiap Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak brakhir
	sanksi terlambat lapor SPT masa PPN : Rp.500,000	tidak ada sanksi karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu

Sumber: Data diolah, 2024

Surat keterangan bebas (SKB) pajak adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak atau pihak berwenang yang menyatakan bahwa suatu entitas atau individu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tertentu. Surat ini sering diberikan kepada perusahaan atau individu yang memenuhi syarat untuk dikecualikan dari pembayaran pajak tertentu berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 yang berlaku menjelaskan bahwa untuk pajak pertambahan Nilai pada jasa pengangkutan ternyata di bebaskan sehingga PT. Anugerah Kreasi Selaras tidak melakukan pembebanan pajak pertambahan nilai pada jasa pengangkutan tersebut.

Karena Fasilitas pembebasan PPN ini diberikan untuk melindungi konsumen angkutan darat khususnya angkutan umum agar tidak terbebani oleh PPN. Alasannya, angka penggunaan jasa angkutan umum darat di Indonesia masih sangat tinggi. Jika PPN dibebankan kepada sektor angkutan darat tentunya akan membuat tarif yang diberikan semakin mahal dan membuat masyarakat dikhawatirkan akan beralih ke modal transportasi lain hingga membatasi masyarakat dengan ekonomi kurang mampu untuk menggunakan transportasi darat. Selain itu, dampak positif pembebasan PPN atas angkutan darat adalah menggerakkan ekonomi pelaku usaha jasa angkutan umum darat di sektor swasta dengan menciptakan lapangan kerja baru karena tingginya permintaan masyarakat atas jasa angkutan umum darat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Maka dari itu, kesimpulan yang diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah PT Anugerah Kreasi Selaras telah menunjukkan kepatuhan dan ketaatan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan selama periode Januari 2021 hingga Desember 2022. Meskipun terdapat keterlambatan pembayaran pajak pada bulan-bulan tertentu, keterlambatan tersebut disebabkan oleh jatuh tempo pembayaran yang jatuh pada hari Minggu yaitu pembayan pada bulan September 2021 dan adapun juga pada bulan Maret dan Juni 2022 dimana batas pembayaran pada tanggal 10 bulan berikutnya atau pembayaran pada hari kerja berikutnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga telah memenuhi kewajiban pemotongan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan telah melakukan pelaporan pajak yang kewajiban pelaporannya harus disampaikan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan ini juga memahami dan mematuhi aturan terkait dengan pengecualian pemotongan untuk perusahaan jasa yang memiliki surat keterangan bebas(SKB) dari direktorat jenderal pajak. Dalam keseluruhan, ketaatan PT Anugerah Kreasi Selaras terhadap peraturan perpajakan mencerminkan profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kontribusi positif terhadap pembangunan dan stabilitas ekonomi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berlaku.

PT. Anugerah Kreasi Selaras, dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, melaksanakan perhitungan, dan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang. Dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dari total pendapatan jasa, perusahaan ini mengevaluasi dan membebas

tugaskan PPN pada jasa pengangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015. Oleh karena itu, perusahaan tersebut tidak perlu menghitung jumlah PPN yang terutang dari nilai layanan pengangkutan darat dalam pelaporan pajaknya. Ini menunjukkan bahwa pelaporan PPN dapat berbeda tergantung pada kebijakan pemerintah yang berlaku dan pengecualian yang mungkin ada untuk jenis-jenis layanan tertentu. Pembebasan ini bertujuan untuk melindungi konsumen angkutan darat, terutama angkutan umum, agar tidak terbebani oleh PPN. Pada tahun 2021, PT Anugerah Kreasi Selaras menghitung jumlah DPP sebesar Rp. 3.682.700.097, dengan PPN terutang yang dibayarkan sebesar Rp. 405.097.011. Sementara pada tahun 2022, jumlah DPP meningkat menjadi Rp. 4.153.114.893, dengan PPN terutang sebesar Rp. 456.842.638 yang dibayarkan. Meskipun demikian, fasilitas pembebasan PPN pada jasa pengangkutan tetap diterapkan. Pemerintah memberikan pembebasan PPN ini untuk menjaga tarif angkutan darat tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama yang ekonominya kurang mampu. Dampak positifnya termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor swasta angkutan umum darat dengan menciptakan lapangan kerja baru. Pembebasan PPN juga diarahkan untuk mencegah beralihnya masyarakat ke moda transportasi lain yang dapat terjadi jika tarif angkutan darat naik akibat beban PPN.

REFERENSI

- Direktorat Jendral Pajak. (2009). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*, Jakarta : Sekretariat Negara.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Penyempurnaan Edisi Tahun 2018*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 2016. Jakarta. (online). Tersedia : www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang*
- Republik Indonesia. (2009). *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ria, Agustin. (2019). analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu.
skripsi perbanas surabaya.